

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas beberapa hal pokok: (a) latar belakang masalah, (b) fokus masalah (c) tujuan penelitian (d) kontribusi penelitian (e) definisi operasional (f) penelitian terdahulu (g) sistematika penelitian.

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada sistem pendidikan Islam aspek pendanaan dapat dimasukkan ke dalam aspek alat.<sup>1</sup> Peralatan pendidikan semua yang digunakan guru dan murid dalam proses pendidikan. Peralatan mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras misalnya gedung sekolah dan laboratorium; perangkat lunak umpamanya kurikulum, metode, dan administrasi sekolah termasuk gaji guru dan pegawai.<sup>2</sup> Dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa dana merupakan salah satu sumber daya pendidikan, dan bagian dari 8 standar nasional pendidikan (SNP).<sup>3</sup> Salah satu unsur penting dalam menjalankan suatu organisasi adalah pendanaannya.<sup>4</sup> Demikian demikian upaya memajukan komponen-komponen pendidikan tanpa disertai dukungan uang seakan pasti mandek di tengah jalan.<sup>5</sup> Pendanaan pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.<sup>6</sup> Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan dana, sehingga dapat dikatakan

---

<sup>1</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 141.

<sup>2</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, 142 dan 150.

<sup>3</sup> *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) 7 &

<sup>4</sup> H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan Dan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 17.

<sup>5</sup> Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2010), 163.

<sup>6</sup> Arwildayanto & Lamatenggo Lune Sumar, *Manajemen Keuangan Dan Pendanaan Pendidikan* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2017), 41.

bahwa tanpa dana, proses pendidikan tidak akan berjalan secara maksimal.<sup>7</sup> Pendanaan pendidikan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa adanya pendanaan, maka pendidikan akan sulit dilaksanakan untuk mencapai tujuannya yang ditetapkan.<sup>8</sup> Sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar sebagaimana berikut.

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”<sup>9</sup>

Tidak bisa dipungkiri memang ada masyarakat mengatakan pendidikan tidak memerlukan dana besar. Pendapat demikian ada benarnya karena bukankah pendidikan tersebut juga terjadi dalam masyarakat sederhana, yaitu, pendidikan informal yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>10</sup> Akan tetapi dalam masyarakat modern pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memerlukan investasi atau modal. Indonesia pernah mengalami kemajuan yang sangat berarti dan berhasil diakui dunia terutama pada pendidikan dasar (SD), dikenal dengan SD INPRES. Kebijakan SD INPRES oleh pemerintah telah sukses meningkatkan ekonomi masyarakat miskin. Bahkan, besaran pengembalian ekonomi sekitar 6,8% hingga 10,6%.<sup>11</sup> Pada zaman yang sama prestasi dibidang

---

<sup>7</sup> Rahmat Hidayat. *Ilmu Pendidikan Islam* (Medan: LPPPI, 2016), 210.

<sup>8</sup> Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 219-220.

<sup>9</sup> *Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3

<sup>10</sup> H.A.R Tilaar. *Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia Suatu Analisis Kebijakan, 1995), 104.

<sup>11</sup> Esther Duflo. *Schooling And Labor Market Consequences Of School Construction In Indonesia: Evidence From An Unusual Policy Experiment*, (Amerika: American Economic

pendidikan yang sangat mengagumkan dibandingkan era pemerintahan kolonial Belanda atau pada masa pemerintahan Soekarno.<sup>12</sup> Tahun 1991 Bank Dunia menerbitkan laporan yang terkenal *The East Asian Miracle* Indonesia tergolong salah satu Macan Asia yang sedang membangun ekonominya.<sup>13</sup> Keberhasilan di atas tidak terlepas dari komitmen pemerintah dengan membangun SD INPRES secara masal dan tentu tidak terlepas dari pendanaan.

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan dihadapkan pada beberapa persoalan diantaranya kemampuan pendanaan pendidikan.<sup>14</sup> Pada umumnya, masalah yang dihadapi madrasah atau sekolah Islam lainnya salah satunya adalah persoalan pendanaan pendidikan.<sup>15</sup> Ditegaskan pembangunan pendidikan nasional bangsa ini dihadapkan pada dua pilihan prioritas kebijakan, yaitu pemerataan akses dan peningkatan kualitas pada berbagai jenjang pendidikan.<sup>16</sup> Pemerataan dalam arti luas meliputi keadilan, persamaan, kemanusiaan, moralitas, dan hak.<sup>17</sup> Kedua pilihan prioritas kebijakan itu masing-masing berimplikasi pada pendanaan yang berbeda-beda. Mengingat pendanaan pendidikan pada dasarnya investasi, setiap pilihan prioritas kebijakan berimplikasi pada balikan atau keuntungan (*return*) yang akan diperoleh di masa yang akan datang, baik keuntungan publik maupun swasta.

---

*Association: 2001*) h 795 lihat juga Mark Bray, *The Costs and Funding of Education*, (Manila, ADB, 2004), 48.

<sup>12</sup> M. C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), 623.

<sup>13</sup> H.A.R.Tilaar. *Membenahi Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001) 1

<sup>14</sup> Muhammad Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional* (Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2009), 234.

<sup>15</sup> Ahmad Munir, "Manajemen Pendanaan Pendidikan Dalam Perspektif Islam," 234.

<sup>16</sup> Mohammad Ali, 330-331.

<sup>17</sup> Walter W. McMahon and Terry G. Geske. *Funding Education: Overcoming Inefficiency and Inequity* (USA: University Of Illinois Press, 1982), 194.

Mengambil prioritas kebijakan yang kedua berimplikasi pada dana investasi yang lebih tinggi, namun akan memperoleh balikan (*return*) jangka panjang.<sup>18</sup> Daya saing nasional, terutama dalam kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi di sektor modern, tergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang terkait dengan penalaran abstrak, analisis, keterampilan bahasa dan komunikasi, serta penerapan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>19</sup> Peningkatan kualitas sebuah lembaga pendidikan salah satu faktornya adalah dana.<sup>20</sup> Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal.<sup>21</sup> Simak Q.S at-Taubah/9: 122. Sebagaimana berikut.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي  
الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya memperdalam ilmu dan menyebarluaskan informasi yang benar. Ia tidak kurang penting dari upaya mempertahankan wilayah. Bahkan, pertahanan wilayah berkaitan erat dengan kemampuan informasi serta kehandalan ilmu pengetahuan atau sumber daya manusia.<sup>22</sup> Salah satu tempat memperdalam ilmu pengetahuan adalah sekolah berkualitas dan berprestasi.

Manfaat pendidikan dapat didefinisikan secara luas termasuk; (a) meningkatkan produksi melalui peningkatan kapasitas angkatan kerja; (b)

---

<sup>18</sup> Muhammad Ali. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, 330-331

<sup>19</sup> Keith M. Lewin. *Strategies for Sustainable Funding of Secondary Education in Sub-Saharan Africa*, (Washington DC, World Bank, 2008), 64.

<sup>20</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, 98.

<sup>21</sup> [http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/211312012/3602ARTIKEL\\_RID](http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/211312012/3602ARTIKEL_RID), diakses, Ahad 09 Oktober 2022.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 751.

meningkatkan efisiensi dengan mengurangi dana, hingga cadangan sumber daya untuk kegiatan produktif lainnya; dan (c) meningkatkan kesadaran sosial masyarakat sehingga taraf hidup meningkat.<sup>23</sup> UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Bab XIII Pasal 49 dana pendidikan selain gaji pendidikan dan kependidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari APBN dan APBD.<sup>24</sup> Komitmen pemerintah mulai tahun anggaran 2009 untuk mengalokasikan dana sekurang-kurangnya 20%, maka diharapkan tidak hanya sebagai pemenuhan konstitusi dan terpenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Akan tetapi, terjadi loncatan besar dalam reformasi pendidikan nasional sampai ke daerah.<sup>25</sup> Mengejar ketertinggalan, mempercepat dan mensejajarkan mutu dan kualitas pendidikan paling tidak di level ASEAN bahkan tingkat Internasional.

Kritikan tajam bahwa SDM Indonesia masih lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya pemerintah tidak ditempatkan pendidikan sebagai prioritas. Masyarakat mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengejar materi untuk memperkaya diri sendiri dan tidak berpikir panjang jauh ke depan.<sup>26</sup> Tingkat penyimpangan anggaran mencapai 30 % semakin memperburuk citra dunia pendidikan di Indonesia.<sup>27</sup> Rentang 2007 hingga 2021 menimbulkan kerugian negara Rp 1,6 triliun.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> Roe L. Johns, Edgar Lmorphet, Kern Alexander. *“The Economics and Funding of Education,”* (USA: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1983) 37.

<sup>24</sup> *Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*, 37.

<sup>25</sup> H. A. R. Tilaar, *Kekuasaan Dan Pendidikan*, 17.

<sup>26</sup> Masykuri Bakri, *Kebijakan Pendidikan Islam*, (Tangerang: Nirmana Media, 2013), 161.

<sup>27</sup> Budi Budaya. Manajemen Pendanaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Yang Efektif (Malang: STHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ISSN: 1410-8771. Volume. 18, Nomor 1), 42

<sup>28</sup><https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-korupsi-sektor-pendidikan-pendidikan-di-tengah-kepuangan-korupsi>, diakses, 03 Nopember 2022.

Dampaknya kesempatan rakyat mendapatkan pendidikan yang berkualitas menjadi sirna. Rilis PISA (*Programme International Student Assessment*) hasil tes 2018, skor membaca anak-anak Indonesia menduduki peringkat 72 dari 77 negara.<sup>29</sup> Kritikan dan kenyataan di atas layak menjadi bahan renungan dan tindakan bagi para elit bangsa, pelaku kebijakan khususnya terkait pendanaan pendidikan.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan pendanaan pendidikan adalah perbandingan internasional.<sup>30</sup> Tanpa daya saing, pertumbuhan ekonomi akan goyah, pendapatan pemerintah akan stagnan, dan pendanaan pendidikan publik di semua tingkatan akan tetap bermasalah.<sup>31</sup> Rata-rata anggaran pendidikan Uni Eropa adalah 5% (PDB), Belanda adalah 7% PDB atau 37% APBN. Di Asia, Indonesia merupakan yang terendah hanya 1,4% PDB, sedangkan Negara lain, Malaysia 5,2% PDB, Vietnam 2,8% PDB, Filipina 3,4% PDB, Thailand 5,0% PDB, Korea Selatan 5,3% PDB, dan Jepang 7,0% PDB.<sup>32</sup>

Pendanaan model BOS diharapkan berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain itu menjadi pilar untuk mewujudkan pendidikan yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat pada pendidikan dasar.<sup>33</sup> Akan tetapi, kenyataannya BOS tidak cukup efektif meningkatkan partisipasi sekolah.

---

<sup>29</sup>Maliki, "Hasil PISA Dan Mutu Pendidikan: Bagaimana Solusinya?" <https://suyanto.id/hasil-pisa-dan-mutu-pendidikan-bagaimana-solusinya/diakses>, Rabu 04 Oktober 2022. Skor matematika berada pada peringkat 72 dari 78 negara. Sementara itu, skor sains bertengger di peringkat 70 dari 78 negara.

<sup>30</sup> Hasan Langgulung. *Asas-Asas Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Pustaka Al Husna Baru, 2008), 141.

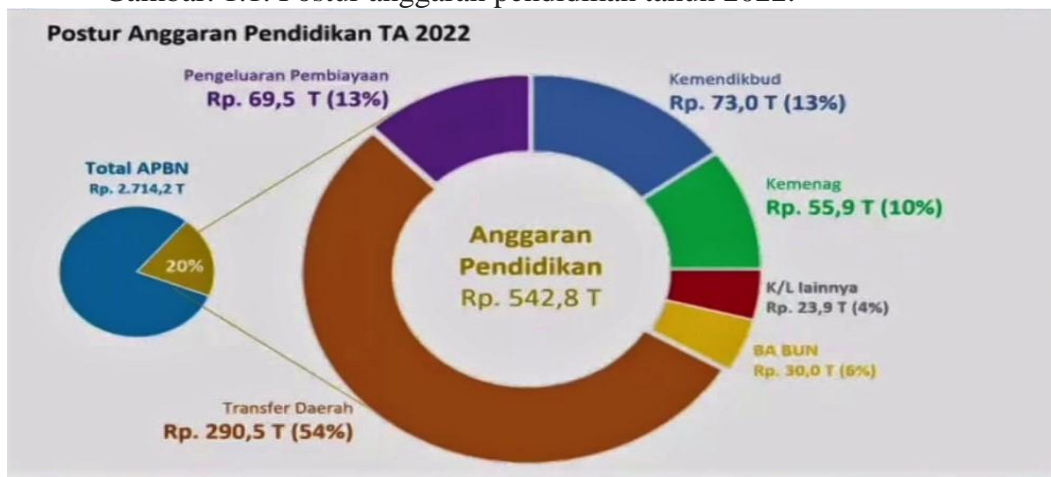
<sup>31</sup> Keith M. Lewin, *Strategies for Sustainable Funding of Secondary Education in Sub-Saharan Africa*, 64.

<sup>32</sup>Rida Fironika K. Pendanaan Pendidikan di Indonesia. lihat <https://media.neliti.com/media/publications/97349-ID-pendanaan-pendidikan-di-indonesia>. Diakses Ahad, 09 Oktober 2022

<sup>33</sup> *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah*, 1.

Banyak anak putus sekolah karena kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan seperti perlengkapan peserta didik, dana transportasi dan sebagainya.<sup>34</sup> Salah satu penyebabnya realisasi anggaran APBD belum mencapai 20%.<sup>35</sup> Pada tahun 2022 APBN 2.714,2 T. Postur anggaran pendidikan 20 % tahun 2022 Rp 542,8 T terdiri dari transfer Daerah 290,5 T (54%), Kemdikbud Rp 73,0 T (13%), Kementerian Agama Rp 55,9 T (10%), pengeluaran pendanaan Rp 69,5 T (13%), Ban Bun 30,0 T (6%) dan lainnya Rp 23,9 T (4%).<sup>36</sup>

Gambar. 1.1. Postur anggaran pendidikan tahun 2022.<sup>37</sup>



Sedangkan menurut perhitungan Bappenas dan UNDP pada tahun 2004, per peserta didik SMP perlu pertahun Rp 2,4 Juta dan SD Rp 1,7 juta. Karena itu, untuk

<sup>34</sup> Dewi Azizah Meydiasari dan H Ady Soejoto. *Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPM Di Indonesia* (Unesa: JPEKA. Vol. 01 No. 02 November 2017) h 122-123.

<sup>35</sup> Dewi Azizah Meydiasari dan H Ady Soejoto. *Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPM Di Indonesia*, 22.

<sup>36</sup> “Sutanto. *Refleksi Kritis Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Dana BOS –Harapan Realita Layanan Dasar Pendidikan*” (Seminar Nasional via Zoom) Oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, Hari Selasa 8 November 2022. Terkait Materi Tersebut Dapat Di Akses via Youtube: ADNE UT Channel.”

<sup>37</sup> Sutanto. *Refleksi Kritis Formulasi dan Implementasi Kebijakan Dana BOS –Harapan Realita Layanan Dasar Pendidikan*”.

pendidikan dasar diperlukan Rp 56 triliun. Untuk tahun 2007 hanya Rp 21 triliun. Untuk peserta didik SD-SMP 33 juta peserta didik, berarti *unit cost* yang disediakan oleh pemerintah hanya Rp 600.000, kurang dari sepertiga dana yang diperlukan.<sup>38</sup> Realisasi pendanaan pendidikan model BOS lebih jauh lebih kecil dibanding perhitungan Bappenas dan UNDP. Pendanaan pendidikan tidak dapat dipelajari secara memadai tanpa mempertimbangkan sepenuhnya pengaruhnya terhadap perekonomian nasional.<sup>39</sup> Pendanaan model BOS yang diperkuat justru pendidikan lanjutan SMA/SMK sederajat. Harusnya yang diperkuat pendanaannya adalah pendidikan dasar. Karena pendidikan dasar menjadi tumpuan, pondasi tempat menempa sehingga menjadi kuat untuk melandasi pendidikan menengah. Akan tetapi kenyataannya bertolak belakang justru *unit cost* SD/MI sederajat dan SMP/MTs lebih kecil dibandingkan *unit cost* SMA/SMK sederajat. Secara epistemologis, pendidikan dasar merupakan pembesikan peserta didik dengan sejumlah dasar-dasar ilmu pengetahuan dan menjadi pengetahuan dasar pada jenjang pendidikan berikutnya. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengamanatkan setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk SD/MI dan SMP/MTs sederajat.<sup>40</sup> Pasal 34 ayat 2 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa

---

<sup>38</sup> Soedijarto, *Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, 110.

<sup>39</sup> "Roe L Johns, Edgar L Morphet and Kern Alexander. *The Economics and Funding of Education* (USA: Prentice-Hall International, Inc, 19839), 9.

<sup>40</sup> *Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*, 10.



memungut dana. Pada ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.<sup>41</sup> Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya di tingkat dasar.<sup>42</sup>

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>43</sup>

Menyelesaikan masalah yang ada, diperlukan langkah strategis dalam pemecahannya. Pertama, melibatkan seluruh komponen lembaga pendidikan yang ada kaitannya dengan proses penyusunan pendanaan pendidikan. Kedua, terkait penempatan alokasi dana, pihak di dalamnya diupayakan mampu menyusun dan mengelola dengan baik. Ketiga, kepala sekolah diharapkan mempunyai keterampilan kewirausahaan dan kemampuan manajerial serta supervisian. Keempat, melibatkan masyarakat dalam penganggaran pendanaan pendidikan.

---

<sup>41</sup> *Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*, 27.

<sup>42</sup> Mark Bray, *The Costs and Funding of Education*, (Manila: Asian Development Bank, 2004), 31.

<sup>43</sup> *Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003* pasal 46 & 47

Kelima, memegang teguh prinsip keadilan amanah, kejujuran, musyawarah, dan sebagainya.<sup>44</sup>

Fakta empiris sekolah/madrasah swasta dalam perkembangannya cukup bervariasi. Ada sekolah/madrasah jalan seadanya sarana prasarannya, gaji guru yang tidak memadai, yang terpenting pendidikan jalan. Sebaliknya banyak sekolah swasta dalam perkembangan sangat pesat. Diantaranya Sekolah Islam Terpadu (SIT). SIT dianggap sekolah yang penomenology, dari segi mutu, prestasi, religius, kelengkapan sarana prasarana, bangunan gedung belajar, kantor, saluran internet, perpustakaan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah gaji tenaga kependidikan yang memadai. Memang banyak masyarakat menginginkan sekolah seperti kriteria di atas sebagai tempat menyekolahkan anaknya. Elit muslim Banjar dalam menetapkan pilihan pendidikan bagi anaknya secara umum didasarkan atas pandangan rasional pada beberapa aspek pertimbangan, yakni: basis pendidikan agama, mutu pendidikan, dan kemampuan lembaga pendidikan dalam melatih dan melaksanakan pembelajaran agama kepada anak secara penuh di tengah kesibukan orang tua.<sup>45</sup> Disisi lain, lahirnya SIT dinilai relevan dengan kondisi masyarakat Kalimantan Selatan yang religius. Kehadirannya pun menjadi alternatif bagi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya. Indonesia sebagai negara demokrasi, kehadiran SIT layak diapresiasi. Tingginya dana SMPIT Ukhuwah Banjarmasin, dan SMPIT Nurul Fikri Banjarmasin serta SMPIT Robbani Banjarbaru ternyata tidak menyurutkan minat para orangtua untuk menyekolahkan anaknya, terbukti

---

<sup>44</sup> Munir, "Manajemen Pendanaan Pendidikan Dalam Perspektif Islam," 236.

<sup>45</sup> Gt. Muhammad Irhmna Husin. *Konstruksi Teologis dan Orientasi Pendidikan Agama Elit Muslim di Kalimantan Selatan* (Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin: Disertasi, 2022), 378

dengan selalu penuhnya kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB) tiap tahunnya.<sup>46</sup> SMPIT Ukhuwah, dan SMPIT Nurul Fikri serta SMPIT Robbani merupakan sekolah-sekolah Islam bermutu, berprestasi dan terkemuka di Kalimantan Selatan, terbukti terakreditasi A.<sup>47</sup> Berdasarkan uraian di atas mengenai permasalahan pendanaan dalam pendidikan, mendorong penulis untuk mencermati dan menganalisis lebih jauh tentang pendanaan pendidikan di SMPIT Ukhuwah Banjarmasin dan SMPIT Nurul Banjarmasin Fikri serta SMPIT Robbani Banjarbaru perlu dilakukan penelitian dengan judul “*Pendanaan Pendidikan Pada Sekolah Islam Terpadu (SIT) di Kalimantan Selatan (Studi Multi Situs di SMPIT Ukhuwah, SMPIT Nurul Fikri dan SMPIT Robbani)*”.

## **B. Fokus Penelitian**

Studi ini berusaha memusatkan perhatian pada masalah pokok tentang model pendanaan pendidikan yang dilaksanakan di SMPIT Ukhuwah Banjarmasin, SMPIT Nurul Fikri Banjarmasin dan SMPIT Robbani Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Masalah pokok tersebut dirinci dalam bentuk pernyataan-pernyataan berikut:

1. Proses awal dan akhir pendanaan pendidikan pada Sekolah Islam Terpadu (SIT): SMPIT Ukhuwah Banjarmasin; SMPIT Nurul Fikri Banjarmasin dan SMPIT Robbani Banjarbaru.

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan salah satu kepala Sekolah di Ukhuwah Banjarmasin via Whatsapp pada tanggal 10 Oktober 2021.

<sup>47</sup><https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=akreditasi+sekolah+ukhuwah+banjarmasin>. Diakses, 9 September 2022 lihat juga <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=qardhan+hasana+banjarbaru>. Diakses, 09 September 2022.

2. Besaran anggaran dan sumber pendanaan pendidikan di Sekolah Islam Terpadu (SIT): SMPIT Ukhuwah Banjarmasin; SMPIT Nurul Fikri Banjarmasin; dan SMPIT Robbani Banjarbaru.
3. Model pendanaan pendidikan di Sekolah Islam Terpadu (SIT): SMPIT Ukhuwah Banjarmasin; SMPIT Nurul Fikri Banjarmasin; dan SMPIT Robbani Banjarbaru.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Menganalisis proses pendanaan pendidikan di Sekolah Islam Terpadu (SIT) di Kalimantan Selatan.
2. Menganalisis besaran dan penggunaan anggaran pendanaan pendidikan di Sekolah Islam Terpadu (SIT) di Kalimantan Selatan.
3. Menganalisis model pendanaan pendidikan di Sekolah Islam Terpadu (SIT) di Kalimantan Selatan.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membangun, mengembangkan pendidikan melalui model-model pendanaan pendidikan yang sudah berkembang dan mapan, terutama terkait dengan model pendanaan pendidikan di sekolah/madrasah swasta maupun negeri.

- b. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dalam melihat lebih jauh dan lebih holistik tentang pendanaan pendidikan di sekolah.
- c. Penelitian ini pula diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya tentang pendanaan dalam Ilmu Pendidikan Islam.
- d. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan literatur dan wawasan bagi komite sekolah dalam memperhatikan perkembangan pendanaan pendidikan di sekolah/madrasah. Demikian juga para pengamat dan pemerhati pendidikan.
- e. Penelitian ini tentu diharapkan dapat menjadi acuan kerangka teoritis dalam pengembangan konsep-konsep yang berkaitan dengan pendanaan pendidikan.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pijakan kepada pihak stakeholder agar memperhatikan pendanaan pendidikan di madrasah dan sekolah. Adapun rincian manfaat secara praktisnya, sebagaimana berikut.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi kepala daerah/bupati dan gubernur sebagai penentu dan pengambil kebijakan dilevel daerah terutama dalam hal pendanaan pendidikan agar pendidikan lebih berkembang dan bermutu.
- b. Hasil penelitian ini pula diharapkan dapat menjadi bahan literasi dan bahan masukan bagi Kementerian Agama/Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi dalam mengimplentasikan pendanaan pendidikan di Madrasah/sekolah.

- c. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pijakan bagi pengelola pendidikan, kepala madrasah dan kepala sekolah serta para pengambil kebijakan untuk mengembangkan pendidikan yang lebih baik, terutama terkait dengan pendanaan pendidikan di sekolah-sekolah Islam, dan Madrasah Negeri maupun swasta serta sekolah-sekolah umum yang ada di Kalimantan Selatan.
- d. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan dan perhatian pihak komite sekolah khususnya dalam memperhatikan pendanaan pendidikan di sekolah.
- e. Mmenjadi kerangka acuan praktis bagi para praktisi pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka terkait dengan beberapa istilah yang digunakan, khususnya mengenai *Pendanaan Pendidikan Pada Sekolah Islam Terpadu Di Kalimantan Selatan*, dalam point ini akan dibuat definisi istilah sebagai berikut:

1. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, selain itu Pendanaan pendidikan dalam penelitian ini adalah pendanaan secara langsung (*direct*). Adapun pendanaan pendidikan yang bersifat tiddak langsung tidak

termasuk dalam penelitian ini, seperti uang saku, uang transportasi dan lain sebagainya.

2. Sekolah Islam Terpadu (SIT) adalah sekolah yang bersimbolkan Islam Terpadu sebagai latarnya (*background*). SIT menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum dan Pendidikan Islam menjadi satu jalinan kurikulum sehingga menjadi kekhasan (*distingsi*). SIT yang termasuk objek penelitian ini adalah SMPIT Ukhuwah, SMPIT Nurul Fikti dan SMPIT Robbani.

Jadi penekanan penelitian ini adalah pendanaan pendidikan yang bersifat langsung dan dari sumber (pemerintah, orangtua peserta didik dan usaha yayasan) yang dialokasikan untuk kelancaran pelayanan pendidikan di sekolah masing-masing.

#### **F. Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian**

Penelitian level disertasi yang menyangkut pendanaan atau pendanaan pendidikan sepanjang yang dapat diakses dan dapat dijangkau, ada beberapa yang peneliti temukan.

1. M. Lahmuddin. *Akuntabilitas Kepala Madrasah Dalam Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah Swasta Provinsi Jambi*. Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018.<sup>48</sup> Penelitian M. Lahmuddin sebanyak 332 halaman ini lebih fokus kepada akuntabilitas dalam pengelolaan pendanaan pendidikan yang lakukan

---

<sup>48</sup><http://repository.uinjambi.ac.id/173/1/DISERTASI%20PDF%20-%20mahluddin%20ruslan.pdf>. Dikases, Sabtu, 02 April 2022.

kepada Madrasah Swasta di Provinsi Jambi. Dalam kesimpulan penelitiannya bahwa kepala madrasah swasta tidak maksimal dalam melakukan akuntabilitas pendanaan pendidikan di madrasah. Kepala madrasah tidak sepenuhnya mengelola pendanaan pendidikan sesuai dengan teori akuntabilitas pendanaan pendidikan.

Penelitian di atas, lebih menitik beratkan kepada akuntabilitas pendanaan pendidikan di Madrasah dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa pendanaan pendidikan di Madrasah tidak sepenuhnya sesuai dengan teori akuntabilitas. Pada dasarnya penelitian tersebut sama-sama tentang pendanaan. Demikian juga dari segi objek sama-sama pada lembaga pendidikan Islam. Namun dari segi penekanan yang berbeda dengan yang penulis teliti yang meliputi: proses pendanaan dan sumber serta model pendanaan pendidikan.

2. Yahya. (2003). *Sistem Manajemen Pendanaan Pendidikan: Suatu Studi Tentang Pendanaan Pendidikan Sekolah Dasar di Propinsi Sumatera Barat*. Disertasi, Universitas Pendidikan Indonesia.<sup>49</sup> Kajian penelitian ini berkaitan dengan sistem manajemen pendanaan pendidikan khususnya di Sekolah Dasar Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuannya adalah untuk mengungkap sistem pendanaan Sekolah Dasar secara umum di Sumatera Barat, mendeskripsikan pendanaan pendidikan Sekolah Dasar dilihat dari tingkat kemampuan membayar (*ability to pay*) masyarakat yang berbeda serta

---

<sup>49</sup><https://www.google.com/search?q=desertasi+manajemen+pendanaan+pendidikan>. Diakses, Minggu 03 April 2022/01 Ramadan 1443 H.



menganalisis potensi apa yang mungkin dikembangkan untuk mendukung pendanaan.<sup>50</sup>

Penelitian di atas lebih menekankan pada sistem manajemen pendanaan pendidikan pada tingkat sekolah dasar (SD) dengan memahami kemampuan masyarakat membayar pendidikan. Sedangkan yang penulis lakukan lebih menekankan pada proses pendanaan pendidikan, sumber dan model pendanaan pendidikan di tingkat SMP lebih khusus Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT). Dari segi lokasi dan objek penelitian berbeda dengan yang penulis teliti. Penelitian tersebut mengkaji sistem manajemen pendanaan pada sekolah dasar di Sumatra Barat.

3. Sasongko. 2017. *Manajemen Pendanaan Pendidikan (Studi Multi Situs SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, dan SMA Negeri 5 Malang)*. Disertasi pada Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.<sup>51</sup> Pendekatan kualitatif dan rancangan studi multi situs dengan metode analisis deskripsi induktif terhadap fakta-fakta dan temuan dalam praktik manajemen pendanaan yang dilakukan di SMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, sumber-sumber pendanaan pendidikan berasal dari tiga sumber pendanaan pendidikan yaitu pemerintah (dana operasional sekolah dan bantuan *blockgrant*), orangtua atau wali peserta didik (sumbangan pembinaan pendidikan, sumbangan dana pengembangan pendidikan dan donasi), dan

---

<sup>50</sup> <https://www.google.com/search?q=desertasi+manajemen+pendanaan+pendidikan>. Diakses, Minggu 03 April 2022/01 Ramadan 1443 H.

<sup>51</sup> <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/disertasi/article/view/77625>. Diakses, Minggu 03 April 2022/01 Ramadan 1443 H.

masyarakat (donasi alumni, *corporate social responsibility*, sponsor). Kedua, perencanaan pendanaan pendidikan disusun dan tertuang dalam RKAS, dilakukan setiap akhir tahun pelajaran sesuai delapan standar nasional pendidikan dan melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Dari sisi pendekatan dan analisis penelitian di atas sama dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu pendekatan kualitatif dan analisis tunggal dan analisis multi kasus. Namun penelitian di atas sama sekali tidak menekankan kepada proses pendanaan pendidikan dan sumbernya serta model pendanaan pendidikan di sekolah seperti yang teliti.

4. Budi Budaya. 2011. *Manajemen Pendanaan Pada Sekolah Dasar yang Efektif (Studi Multi Kasus Sekolah Dasar Panglima Sudirman, Sekolah Dasar Abdul Rahman, dan Sekolah Dasar Welirang di Kota Batu)*. Disertasi pada Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.<sup>52</sup> Masalah dalam penelitian ini adalah difokuskan pada upaya-upaya sekolah untuk mengatasi pendanaan pendidikan, terutama ketika mulai tahun ajaran baru sementara dana BOS belum keluar.<sup>53</sup> Penelitian di atas menggunakan pendekatan kualitatif sama dengan pendekatan penelitian yang penulis lakukan, disamping itu sama-sama mengupas tentang pendanaan secara teori. Secara teori menjadi bahan gambaran untuk lebih memperkaya wawasan penulis dalam disertasi. Adapun dari segi perbedaan dengan

---

<sup>52</sup><https://www.google.com/search?q=desertasi+manajemen+pendanaan+pendidikan&oq=> Diakses, 03 April 2022/ 01 Ramadan 1443.

<sup>53</sup> <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/disertasi/article/view/16751>, diakses, 03 April 2022/01 Ramadan 1443 H.

yang penulis teliti adalah dari segi lokasi dan subjek. Selain itu penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan kepada proses pendanaan pendidikan dan sumber serta model pendanaan. Sedangkan disertasi di atas lebih kepada upaya pendanaan agar proses pendidikan di sekolah tetap berjalan dengan lancar terutama ketika dana BOS belum keluar.

5. Ahmad Juhaidi. 2012. *Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Dari Perusahaan Tambang Batu Bara (Studi Tentang Pengelolaan Dana CSR Pendidikan Untuk Sekolah Dan Madrasah Sekitar Area Tambang PT Adaro Indonesia Kabupaten Balangan Dan Tabalong Kalimantan Selatan)*.<sup>54</sup> Desertasi Pada Program Pascasarjana UPI Bandung.

Temuan penelitian mengungkapkan secara distribusi dana CSR PT. Adaro Indonesia dan Pather ada dua mekanisme, yaitu penyaluran langsung dan tidak langsung. Distribusi dan alokasi CSR PT. Adaro Indonesia sebagian besar tidak langsung diberikan kepada proses pendidikan. Distribusi dan alokasi program CSR tersebut mayoritas diberikan kepada sarana prasarana TK/RA, TKA/TPA, beapeserta didik pendidikan tinggi, serta pihak ketiga Primagama. Distribusi yang langsung ke sekolah hanya kepada SDN Sungai Ketapi, SMPN 3 Paringin, dan SMPN 4 Halong yang menerima mendapat alokasi program CSR di tahun 2010. Dana CSR yang didistribusikan ke lembaga non sekolah/madrasah, yaitu TK dan TK/TPA serta Bimbingan Belajar Primagama sebesar Rp. 4.240.000.000, -atau 97, 81% dari total dana CSR pendidikan Rp. 4.335.000.000 sedangkan dana yang langsung untuk sekolah/madrasah sebesar

---

<sup>54</sup> <https://idr.uin-antasari.ac.id/45/> diakses, 25 Desember 2022.

Rp. 95.000.000 atau 2, 91% dari total alokasi CSR pendidikan PT. Adaro Indonesia.

Penelitian tersebut di atas mengungkapkan sumber pendanaan pendidikan yang berasal dari CSR PT. Adaro Indonesia dan Pather. Secara otomatis mengupas teori tentang pendanaan pendidikan secara garis besar. Dari segi teori sama-sama mengupas tentang pendanaan pendidikan. Sehingga dapat dijadikan bahan masukan (*income*) pengayaan bagi penulis dalam memperkaya teori. Demikian juga dari segi metode penelitian, yaitu sama-sama pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada okasi penelitian atau subjek dan objek penelitian. Berbeda yang penulis teliti adalah pada lembaga pendidikan Islam yang meliputi: proses pendanaan pendidikan, sumber serta model pendanaannya.

6. Eddy Khairuddin. 2019. *Pengaruh Pendanaan Pendidikan, Sosio Ekonomi Keluarga dan Kompetensi Profesionalisme Guru Terhadap Kinerja Guru dan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) Peserta didik SMA/SMK Se Kota Banjarmasin*.<sup>55</sup> Disertasi pada Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Secara teoritis penelitian ini tidak menyinggung model-model pendanaan pendidikan, akan tetapi lebih kepada pendanaan pendidikan secara umum yang berbicara pada tataran penerimaan dan pengeluaran (*income/output*). Namun secara teoritis dapat membantu penulis dalam memperkaya teori penelitian yang penulis lakukan. Penelitian tersebut di atas

---

<sup>55</sup>Eddy Khairuddin, *Pengaruh Pendanaan Pendidikan, Sosio Ekonomi Keluarga Dan Kompetensi Profesionalisme Guru Terhadap Kinerja Guru Dan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) Peserta didik SMA/SMK Se Kota Banjarmasin (Ringkasan Disertasi)*., (Banjarmasin: UIN Antasari, 2019), i.

termasuk dalam penelitian kuantitatif. Analisis data *statistik deskriptif*. Salah satu temuan mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh pendanaan pendidikan terhadap kinerja guru SMA/SMK Kota Banjarmasin. Namun, terdapat pengaruh pendanaan pendidikan atas komponen belanja personil terhadap prestasi belajar peserta didik pada satuan pendidikan SMA/SMK Kota Banjarmasin.<sup>56</sup>

Disertasi di atas, berbeda dengan yang peneliti lakukan. Baik itu lokasi penelitian, pendekatan penelitian data, serta analisis data. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan di sekolah Islam Terpadu. Secara pengelolaan Sekolah Islam Terpadu dikelola oleh Yayasan. Sedangkan SMA/SMK yang dimaksud di atas adalah SMA/SMK Negeri maupun Swasta dalam lingkup Kota Banjarmasin. Pendekatan yang peneliti lakukan adalah pendekatan kualitatif dan analisis data tidak menggunakan *statistic deskriptif*.

Untuk memperjelas agar tidak ada tarik ulur antara disiplin keilmuan khususnya disiplin Manajemen Pendidikan dengan disiplin Pendidikan Agama Islam. Maka penulis akan kemukakan argumentasi secara teoritis dan secara historis serta praktis. Secara teoritis pendidikan Islam tidak hanya bersangkut paut dengan kurikulum yang kenaaan denga menulis-membaca saja. Akan tetapi kurikulum selalu berkembang dan diperkaya agar pendidikan Islam tidak kaku dan dapat beradaptasi dengan perubahan dan tidak kelimpungan. Karena kalau pendidikan Islam tidak berkembang dan diperkaya serta skeptisme, maka hal tersebut menjadi titik lemah pendidikan Islam itu sendiri. Secara filosofis Abuddin

---

<sup>56</sup> Eddy Khairuddin...h 182.

Nata pun mengatakan tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum.<sup>57</sup> Dalam system pendidikan nasional pendanaan pendidikan merupakan salah satu standar pendidikan.<sup>58</sup>

Sebagaimana penulis kemukakan pada awal bab ini bahwa dalam sistem pendidikan, aspek dana atau pendanaan dapat dimasukkan ke dalam aspek alat. Lebih lanjut dalam pengertian yang lebih luas, peralatan pendidikan adalah semua yang digunakan guru dan murid dalam proses pendidikan. Ini mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras antara lain: gedung sekolah dan alat laboratorium; perangkat lunak kurikulum, metode dan administrasi pendidikan.<sup>59</sup>

Secara historis, pada permulaan pendidikan Islam, peralatan yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar amat sederhana. Kegiatan belajar mengajar terkadang dilakukan dirumah, masjid, halaman. Karena rumah pada dasarnya adalah sebagai tempat istirahat dan ketentraman. Maka sebagai reaksioner terhadap phenomena tersebut timbullah pemikiran untuk perkembangan sarana prasarana pendidikan Islam secara profesional. Artinya, pembelajaran tidak lagi dilakukan secara sambilan seiring perkembangan itu sendiri. Dengan lain kata bahwa diperlukan gedung sekolah, kantor, gedung perpustakaan dan peralatan laboratorium dan untuk pengadaan peralatan secara khusus. Dengan situasi dengan demikian itulah, maka pendanaan pendidikan merupakan yang harus diadakan secara khusus.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Abuddin Nata. *Ilmu Pendidikan Islam*, 95.

<sup>58</sup> Standara pendidikan terdiri dari atas standar isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, penilaian dan kurikulum serta pendanaan.

<sup>59</sup> Ahmad Tafsir. *Ilmu Pendidikan Islam*, 142.

<sup>60</sup> Abuddin Nata. *Ilmu Pendidikan Islam*, 219.

Secara praktis penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan di lembaga pendidikan Islam, yaitu SMPIT Ukhuwah Banjarmasin, SMPIT Nurul Fikri Banjarmasin dan SMPIT Robbani Banjarbaru. Sekolah yang memasukkan nilai-nilai Islami pada semua mata pelajaran yang disampaikan guru ke peserta didik.<sup>61</sup> Sekolah Islam yang diselenggarakan dengan memadukan secara integrative nilai dan ajaran Islam dalam bangunan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran yang efektif dan pelibatan yang optimal dan koperatif antara guru dan orangtua, serta masyarakat untuk membina karakter dan kompetensi murid. Konstruktif pendidikan Islam tidak hanya berkuatat mengembangkan pembelajarannya saja, melainkan juga pendanaan pendidikannya karena pendidikan Islam dalam prakteknya perlu berbagai insprastruktur termasuk perlatan agar pendidikan Islam tersebut berjalan dengan baik.

Selanjutnya objek penelitian ini adalah model pendanaan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan Islam tersebut di atas. Pendanaan pendidikan tergolong salah satu aspek alat dalam pendidikan Islam. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa pendanaan pendidikan merupakan salah satu komponen dalam sistem penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian dengan berpijak dari teori dan sejarah serta lembaganya maka penelitian ini dapat digolongkan ke dalam golongan pendidikan Islam khususnya program Studi Pendidikan Agama Islam. Artinya penelitian pendidikan Islam tidak hanya pada

---

<sup>61</sup> Anim Purwanto, *Pengembangan Kurikulum Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) di Sekolah Dasar Islam Terpadu* (JURNAL BASICEDU Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022), 339.

tataran pembelajaran yang berakitan dengan syar'iyah, akidah dan akhlak saja, akan tetapi lebih terbuka, luwes dan berkembang serta redefinisi agar pendidikan Islam maju.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam studi ini terdiri dari enam bab, dan masing-masing dibagi menjadi beberapa subbab.

BAB 1. Sebagai pendahuluan, menyajikan pokok-pokok yang melatarbelakangi munculnya permasalahan penelitian, dilanjutkan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikan penelitian, dan penelitian terdahulu serta sub bab yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri atas empat sub bab pembahasan. Sub bab pertama tentang definisi teori, subbab kedua pendanaan pendidikan, dan subbab ketiga kerangka berpikir.

BAB III. Metode Penelitian. Bab ini memuat beberapa subbab. Sub bab pertama tentang jenis dan pendekatan penelitian, subbab kedua memuat tentang lokasi penelitian, subbab yang ketiga membahas subjek dan objek penelitian, subbab keempat tentang data dan sumber data, subbab yang keempat mengupas tentang teknik pengumpulan data, dan subbab kelima memuat teknik analisis data, serta subbab yang terakhir pengecekan keabsahan data.

BAB IV. Paparan Hasil Penelitian. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab yang pertama tentang gambaran umum lokasi penelitian, subbab yang kedua, proses pendanaan pendidikan pada SMPIT Ukhuwah, SMPIT Nurul Fikri



dan SMPIT Robbani. Sub bab yang ketiga, memuat tentang analisis hasil penelitian: analisis situs tunggal, analisis lintas situs dan proposasi.

BAB V. Adalah bab penutup dalam penulisan disertasi ini, yang berisi simpulan dan saran serta rekomendasi.